

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Fauzi, Ahmad., & Nisa, Baiatun., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Henry, N. (1988). *Administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan*. Penerbit: Rajawali.
- Indradi, Sjamiar Sjamsuddin. (2006). *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- M.Si, Hardani., & Ustiawaty, Jumari., dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*.
- Saparin. (1986). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*.

Skripsi/Jurnal

- Andriani, A. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Parkdi Kabupaten Tabalong* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol.18 No.4, halaman 543-571.
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Arifin, S. (2018). Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(3), 315-332.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah.
- Cahya, N. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makassar. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*, 1-29.
- Gunawan, A., & MARUF, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*, 8(2).
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140-148.
- Hijawati, H. (2020). Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Solusi*, 18(3), 394-406.

- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. *CV. Dharma Persada Dharmasraya*.
- Kurnia, I. (2010). PERKEMBANGAN DIACRONIS ADMINISTRASI PUBLIK (Dari New Public Management ke Good Governance). *Academica*, 2(1).
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 16-17.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Nurhadryani, Y. (2015). Memahami Konsep E-governance Serta Hubungannya dengan E-government. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 6).
- SALLATU, M. A. (2007). *Partisipasi Stakeholder dalam Formulasi RPJP-D Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sumarjan, H. W. (2020). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Program Campus Social Responsibility Di Dinas Sosial Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8, Ayat (1).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62, Ayat (1).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah

Peraturan Polri No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Walikota Kendari No. 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari

Peraturan Walikota Kendari No. 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005 – 2025

Website

Sbbkab.go.id. 25 April 2022. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. <https://sbbkab.go.id/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pengedar-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar/> (Diakses pada 26 Februari 2023 pukul 23.31 WITA).

Pom.Go.Id. 1 September 2019. Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat “Ayo Buang Sampah Obat”. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/491/-----AKSI-NASIONAL-PEMBERANTASAN-OBAT-ILEGAL-DAN-PENYALAHGUNAAN-OBAT-----AYO-BUANG-SAMPAH-OBAT-----.html> (Diakses pada 2 Maret 2023 pukul 22.56 WITA).

Hellosehat.com. Mengenal Kandungan Obat PCC dan Bahaya Kecanduannya. <https://hellosehat.com/obat-suplemen/kandungan-overdosis-obat-pcc/> (Diakses pada 27 Februari 2023 pukul 03.59 WITA).

Nasional.tempo.co. 16 September 2017. 9 Tersangka Kasus Oat PCC di Kendari Terancam 15 Tahun Bui. <https://nasional.tempo.co/read/909581/9-tersangka-kasus-obat-pcc-di-kendari-terancam-15-tahun-bui> (Diakses pada 28 Februari 2023 pukul 04.13 WITA)

Kendari.pom.go.id. 15 Maret 2023. Bimtek Keamanan Pangan Wujud Komitmen Pelaku Usaha Pangan Industri Rumah Tangga Kota Kendari. <https://kendari.pom.go.id/berita/bimtek-keamanan-pangan-wujud-komitmen-pelaku-usaha-pangan-industri-rumah-tangga-kota-kendari> (Diakses 8 Januari 2024 pukul 22.37 WITA)

Kendari.pom.go.id. 21 Mei 2023. Generasi Muda Berprestasi, Sehat dan Cerdas Berkarakter, Amanah Tolak Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat. <https://www.pom.go.id/berita/Generasi-Muda-Berprestasi,-Sehat-Dan-Cerdas-Berkarakter,-Amanah-Tolak-Obat-Ilegal-dan-Penyalahgunaan-Obat> (Diakses pada 8 Januari 2024 pukul 22.03 WITA)

Kendari.pom.go.id. 10 Januari 2024. Berantas Penyalahgunaan Obat, Balai POM di Kendari Gagalkan Peredaran Ribuan Obat Terlarang. <https://kendari.pom.go.id/berita/berantas-penyalahgunaan-obat-balai-pom-di-kendari-gagalkan-peredaran-ribuan-obat-terlarang> (Diakses pada 3 Februari 2024 pukul 16.34 WITA)

Kendari.pom.go.id. 30 Agustus 2022. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal Hasil Operasi Penindakan 2019-2021 dan Hasil Pengawasan 2022 Balai POM di Kendari <https://kendari.pom.go.id/berita/pemusnahan-obat-dan-makanan-ilegal-hasil-operasi-penindakan-2019-2021-dan-hasil-pengawasan-2022-balai-pengawas-obat-dan-makanan-di-kendari> (Diakses pada 29 Juli 2024 pukul 22.03 WITA)

Kpai.go.id. 21 September 2017. KPAI : Kasus PCC Kendari Fenomena Gunung Es. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-pcc-kendari-fenomena-gunung-es> (Diakses pada 29 Juli 2024 pukul 22.11 WITA)

Antaraneews.com. 14 September 2017. Kendari Heboh Keracunan PCC, Ini Datanya. <https://www.antaraneews.com/berita/652603/kendari-heboh-keracunan-obat-pcc-ini-datanya> (Diakses pada 29 Juli 2024 pukul 22.15 WITA)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

I. Biodata Peneliti

Biodata



Identitas Diri

Nama : Muhammad Fathurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 19 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. D. I. Panjaitan, Lr. Meohai, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara
No. Handphone : 085254372670
Email : misterfathur75@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005 – 2006 : TK Nurul Haq Kendari
2006 – 2012 : SD Negeri 3 Poasia
2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Kendari
2015 – 2018 : SMA Negeri 4 Kendari
2019-2024 : Universitas Hasanuddin, Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Riwayat Organisasi

1. Anggota Biro Kesekretariatan HUMANIS FISIP UNHAS 2021-2022
2. Anggota UKM Taekwondo RHXXVIII UNHAS

II. Dokumentasi

Wawancara Bersama Balai POM di Kendari



Wawancara Bersama Dinas Kesehatan Kota Kendari



Wawancara Bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari



Wawancara Bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara



Wawancara Bersama IAI PD Sulawesi Tenggara



Wawancara Bersama PBF Indra



Wawancara Bersama Kopsa Chicken



III. Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. (0401) 3131068 Kendari

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 988/ 2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
- b. Menimbang : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 6280/UN4.8.1/PT.01.00/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- c. Nama : MUHAMMAD FATHURRAHMAN
d. Tempat /identitas : Jl. D.I Panjaitan Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari
e. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Penyusunan Skripsi dengan judul :
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DI KOTA KENDARI
2). Lokasi penelitian : Kota Kendari
3). Waktu Kegiatan : Oktober – Desember 2023
4). Bidang Penelitian : collaborative Governance dalam pengawasan obat
5). Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama, dan adat istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian yang dimaksud;
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Kendari cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.

Kendari, 2 Oktober 2023

An. KEPALA,
Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
Agama dan Organisasi Masyarakat

YOTMAN PUTRA SAEHO, SE.
Pembina /Gol. IV.a
NIP. 19680206 198901 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Kendari (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Tempat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di Kendari;
5. Kapolda Kepolisian Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Balai POM di Kendari;
7. Ketua Prodi Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin di Tempat;
8. Yang Bersangkutan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya;



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI

Kompleks Bumi Proja Anduonohu Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93232

Telp : (0401) 3195855; Fax : (0401) 3195513;

Email: bpom_kendari@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.27A.27A5.10.23.228

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc
NIP : 19840901 201012 1 001
Pangkat : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Balai POM di Kendari

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fathurrahman
Stambuk : E011 19 1031
Prog. Studi : Administrasi Negara
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Hasnuddin

Telah melaksanakan penelitian/pengambilan data dan wawancara di unit kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang berkaitan dengan judul Skripsi yaitu "Collaborative Governance dalam Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kota Kendari" pada tanggal 18 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 18 Oktober 2023
Kepala Balai POM di Kendari,



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Brigjenl. Z.A. Sugiarto No. 37 Telp. (0401) 3124456 Kendari

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : *800/B444*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kasubag Hukum, Kepegawatan dan Umum Dinas Kesehatan Kota Kendari dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **Muhammad-Fathurrahman**
NIM : E0111 19 1031
Jurusan : Administrasi Publik
Instansi : Universitas Hasanuddin
Judul Penelitian : **"Collaborative Governance Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu Di Kota Kendari"**
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Kendari

Adalah benar telah melakukan penelitian terhitung bulan Oktober 2023 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 24 Oktober 2023

An Kepala Dinas Kesehatan

Kasubag Hukum, Kepegawatan dan Umum.





PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Balaikota II No. 65 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 521-800/671/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Megawati Muntu, SH**
NIP : 19671212 199103 2 011
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari

Menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Fathurrahman**
NIM : E 0111 19 1031
Jurusan : Administrasi Publik
Instansi : Universitas Hasanuddin
Judul Penelitian : "Collaborative Governance dalam Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kota Kendari"
Lokasi Penelitian : Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian terhitung mulai bulan Oktober 2023 sampai selesai.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, Desember 2023

Kepala Dinas,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



MEGAWATI MUNTU, SH
19671212 199103 2 011



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : *B/ 108 /IV/2024/Ditreskrimsus.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG WIJANARKO, S.I.K.
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI
Nrp : 75100915
Jabatan : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Kesatuan : POLDA SULAWESI TENGGARA.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD FATHURRAHMAN
Nim : E011191031
Pekerjaan : MAHASISWA
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Penelitian : COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DI KOTA KENDARI.

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra selama 1 Hari, terhitung mulai tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kendari, 3 April 2024
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS


BAMBANG WIJANARKO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75100915

IV. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Data	Informan
Kondisi Awal	1. Latar Belakang	Apa yang melatarbelakangi terjadinya kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan terpadu?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah
		Apa yang membuat IAI tertarik untuk terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi pengawasan obat dan makanan terpadu?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak IAI
	2. Ketidakseimbangan Sumber Daya	Apakah ada yang menyebabkan sehingga pemerintah memerlukan pihak lain dalam melaksanakan kolaborasi ini?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah
		Apa dampak dari pelaksanaan kolaborasi bagi pihak pemerintah dalam hal sumber daya?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah
Desain Kelembagaan	1. Aturan Dasar	Apakah terdapat aturan dasar pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi pengawasan obat dan makanan terpadu?	Sekunder : ➢ MoU	Pihak Pemerintah
		Apakah aturan dasar pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dan pihak masyarakat dalam pelaksanaan kolaborasi ini?	Sekunder : ➢ MoU	Pihak Pemerintah
		Apakah terdapat aturan dasar bagi IAI selaku perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan kolaborasi pengawasan obat dan makanan terpadu?	Sekunder : ➢ MoU	Pihak IAI
	2. Peran	Apakah saja tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi pengawasan obat dan makanan terpadu?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Data	Informan
		Apakah ada pihak yang kurang proaktif dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pelaksanaan kolaborasi pengawasan obat dan makanan terpadu?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI
Kepemimpinan	1. Pengambilan Keputusan	Bagaimana stakeholder atau pihak yang terlibat melakukan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kolaborasi ini?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI
		Apakah sering terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan? Bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI
	2. Komitmen	Bagaimana komitmen tiap pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kolaborasi?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
		Bagaimana pihak pemerintah menyikapi pihak swasta yang kurang berkomitmen dalam menjalankan tanggungjawabnya?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah
Proses Kolaboratif	1. Dialog Tatap Muka	Apakah pemerintah melibatkan semua pihak dalam rapat/pertemuan terkait pengawasan obat dan makanan terpadu?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
		Seberapa sering pelaku usaha dilibatkan dalam rapat/pertemuan terkait pengawasan obat dan makanan?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak Pelaku Usaha

2. Membangun Kepercayaan	Bagaimana tingkat kepercayaan antar stakeholder?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
	Bagaimana kelancaran komunikasi antar pihak atau stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi ini?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
3. Komitmen Pada Proses	Apakah ada hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam pelaksanaan kolaborasi ini?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
	Seberapa sering pihak pemerintah melaksanakan pengawasan rutin dan pembinaan terhadap pelaku usaha?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pelaku Usaha
4. Pemahaman Bersama	Apakah pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini sudah mengetahui dengan jelas terkait tujuan yang ingin dicapai dan juga permasalahan yang dihadapi?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
	Bagaimana cara untuk menyelaraskan pemahaman bersama antar stakeholder sehingga tujuan dari pelaksanaan kolaborasi ini bisa tercapai?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
5. Hasil Sementara	Apa hasil sementara yang dapat dilihat sebagai hasil kolaborasi antar ketiga pihak?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
	Apa hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kolaborasi?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha
	Apakah ada hal yang perlu ditingkatkan atau saran demi meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan?	Primer : ➢ Wawancara ➢ Observasi	Pihak Pemerintah Pihak IAI Pihak Pelaku Usaha